

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI
DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Daerah (SKPD) di Kota Pekanbaru)**

Oleh :
Zuria Alhafziani
Pembimbing : Yessi Mutia Basri dan Rofika

Faculty of economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: ziazuriaalhafziani@gmail.com

*The Influence of Human Resources, Information Technology and Organizational
Culture on the Implementation of Government Accounting Standards Accrual
(Empirical Study in work unit (SKPD) in Pekanbaru)*

ABSTRACT

The issuance of Government Regulation 71 Year 2010 concern the Government Accounting Standards (SAP) accrual-based and Regulation of the Minister of the Interior of the Republic Indonesia (Permendagri) 64 Year 2013 required the regional government included Pekanbaru to implement accrual-based financial statements started in 2015. The purpose of this study was to determine the influence of human resources, information technology and organizational culture on the implementation of government accounting standards accrual based in regional government. The object of this study is SKPD in Pekanbaru City. The data used is primary data obtained from distributed questionnaires to respondents were selected by purposive sampling technique. The reason and consideration that respondent in this study included employees who participate and determine the extent of accrual based accounting is applied in regional government. Data analysis methods used in this study is the multiple linear regression analysis by SPSS 17.0. The results of the road map study indicated that variable the human resources, information technology and organizational culture influence on the implementation of government accounting standards accrual based in regional government.

Keywords : government accounting standards, accrual based, implementation, human resources, information technology, organizational culture, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.64 Tahun 2013

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

2005 yang menyatakan bahwa isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Penerapan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 2005 masih bersifat sementara. Pemerintah melakukan usaha berkelanjutan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual. Sesuai dengan amanat dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis kas. Dan selambat-lambatnya ketentuan berbasis akrual tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanat yang dicantumkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri sebagai barisan paling depan dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dalam permendagri ini diamanatkan diantaranya peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi dimaksud adalah kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Dan kebijakan akuntansi yang mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau

pengungkapan peristiwa sesuai dengan PSAP untuk pemilihan metode akuntansi dalam kebijakan SAP.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapainya diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana variabel kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan budaya organisasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah.

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu masih bersifat persiapan dan diteliti sebelum Pemerintah Daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual yaitu pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan pada saat SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah sudah dijalankan. Dan karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat pentingnya persiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapainya diperlukan faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan

suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah khususnya Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Budaya Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Pekanbaru”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Apakah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, 2)Apakah teknologi informasi yang diterapkan pemerintah Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, 3)Apakah budaya organisasi yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi

keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Bachtiar Arif dkk, 2002:3).

Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Basis Akuntansi Akrual

Basis akrual seperti yang sudah disimpulkan oleh KSAP dalam Epiane (2015) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa akuntansi lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan

informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Tabel 1
Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrual)	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas Laporan • Perubahan Ekuitas • Catatan atas Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih • Neraca • Laporan Arus Kas • Laporan Operasional (LO) • Laporan Perubahan Ekuitas • Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber : Hariyanto, 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013

Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Jadi, masih ada waktu setahun lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum SAP berbasis akrual benar-benar diterapkan pada awal tahun anggaran 2015.

Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 tersebut semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan nantinya terutama kalau kita pelajari Lampiran II (Panduan Penyusunan SAPD) dan Lampiran III (Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah yang ditetapkan hingga 5 digit (rincian obyek)).

Implementasi SAP Berbasis Akrual

Perubahan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut (Yamamoto dalam Mardiasmo:2009). IFAC dalam Nazier (2009) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari

cash basis menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandate dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislative.

Kemudian menurut KSAP (2010) setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan skill pelaksana, membangun *awareness* dan mengajak keterlibatan semua pihak.
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat local seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta adanya langkah-langkah strategis untuk

mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempratikan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar dan professional.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual (PP No.71 Tahun 2010)

Definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al. dalam (Wiyono:2008) adalah Sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh : karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri:2010).

Teknologi Informasi

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

Budaya Organisasi

Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan kinerjanya.

Sumber Daya Manusia dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua

SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrua. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma(2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma(2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrua membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. Maka hipotesis

yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrua.

Teknologi Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013) yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrua. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilaklukkan oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 tahun 2005.

H2: Teknologi Informasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrua.

Budaya Organisasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Mengubah budaya bukanlah pekerjaan yang gampang. Dari sudut waktu, perubahan dapat menghabiskan 5 sampai 10 tahun, itupun tingkat keberhasilannya masih dipertanyakan karena respon pegawai terhadap perubahan sangat bervariasi

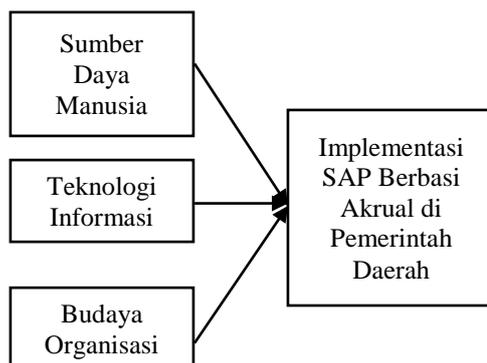
(Sobirin, 2005). Keberhasilan perubahan budaya salah satunya bergantung pada kuat atau tidaknya budaya yang sekarang ada. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya adalah kemauan para anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam perubahan.

H3: Budaya Organisasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual.

Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model pada penelitian ini adalah:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2016

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada tahun 2016. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan yang pada SKPD di Pemerintah Kota Pekanbaru. Responden yang dipilih melalui

metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang menjadi pengelola keuangan langsung yaitu Pejabat Pembuat Komite (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran (PPTK) dan Bendahara Pembantu (BPP) yang ada di 25 SKPD di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yaitu metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pernyataan tertulis menggunakan skala likert.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul yang mencakup perhitungan dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Sugiyono, 2012:206). Statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Statistik Dekriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
SDM	88	14	34	25.70	4.273
TI	88	14	30	22.83	3.739
BO	88	9	19	15.05	2.505
Implementasi SAP berbasis Akrual	88	10	20	15.10	2.334
Valid N (listwise)	88				

Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil Uji Validitas

Pengujian dilakukan dengan metode korelasi *product moment* dari *Pearson* dengan cara melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total (*item-total correlation*). Butir dikatakan sah atau valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel
Sumber Daya Manusia

Item	R hitung	R table	Kesimpulan
SDM1	0.602	0.2096	Valid
SDM2	0.573	0.2096	Valid
SDM3	0.797	0.2096	Valid
SDM4	0.655	0.2096	Valid
SDM5	0.612	0.2096	Valid
SDM6	0.691	0.2096	Valid
SDM7	0.406	0.2096	Valid

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel
Teknologi Informasi

Item	R hitung	R table	Kesimpulan
TIF1	0.851	0.2096	Valid
TIF2	0.512	0.2096	Valid
TIF3	0.608	0.2096	Valid
TIF4	0.784	0.2096	Valid
TIF5	0.438	0.2096	Valid
TIF6	0.837	0.2096	Valid

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel
Budaya Organisasi

Item	R hitung	R table	Kesimpulan
BO1	0.369	0.2096	Valid
BO2	0.571	0.2096	Valid
BO3	0.660	0.2096	Valid
BO4	0.724	0.2096	Valid

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel
Implementasi SAP berbasis Akrual
di Daerah

Item	R hitung	R tabel	Kesimpulan
ISBA1	0.612	0.2096	Valid
ISBA2	0.500	0.2096	Valid
ISBA3	0.531	0.2096	Valid
ISBA4	0.526	0.2096	Valid

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan SPSS 17,00. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2009).

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Nilai Kritis	Cronbach Alpha	Kesimpulan
SDM	0,60	0,855	Reliabel
TI	0,60	0,868	Reliabel
BO	0,60	0,773	Reliabel
Implementasi SAP berbasis Akrual	0,60	0,741	Reliabel

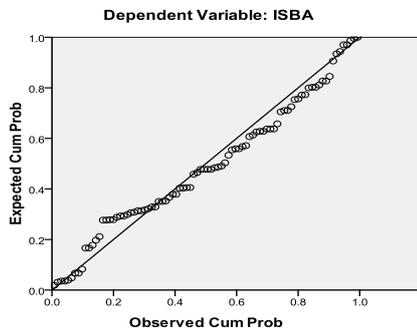
Sumber : *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel memiliki distribusi normal. Dapat dilihat penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) atau tidak. Adanya multikolonieritas dapat diketahui jika nilai VIF > 10.

Tabel 8

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SDM	.592	1.689
TIF	.726	1.378
BO	.671	1.491

Sumber : Data Olahan, 2016

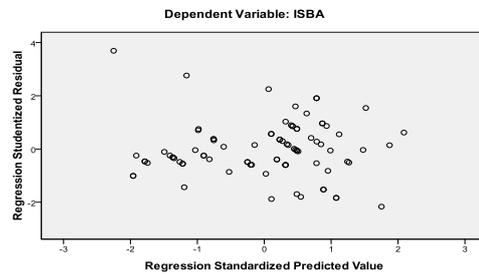
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedasitas dapat dilakukan dengan melihat *Scatterplot*. Jika *Scatterplot* membentuk pola tertentu yang jelas maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas.

Gambar 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan $(4 - dU)$ atau $du \leq DW \leq (4 - dU)$, berarti bebas dari Autokorelasi.

Tabel 9

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.852 ^a	.726	.717	1.243	1.878

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji regresi linier berganda.

Tabel 10

Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	T hit	Sig	Keputusan
(Constant)	.311	.310	.757	
SDM	.167	4.116	.000	Sig
TIF	.293	7.009	.000	Sig
BO	.253	3.898	.000	Sig

Sumber : Data Olahan, 2016

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan keseluruhan variabel independen dapat

menjelaskan variabel dependen. Pengujian ini memperhatikan nilai *Adjusted R Square* yang terdapat pada tabel *model summary*.

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.852 ^a	.726	.717

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji *t* digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji *t* dapat dihitung dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan kata lain bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan begitu juga sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, dengan kata lain bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,116 dan t_{tabel} sebesar 1,989. Serta P_{value} sebesar $0,000 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai P_{value} lebih kecil dari nilai α 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

di daerah. Dengan demikian H_{01} ditolak dan **H_{a1} diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Moh. Mashudi Arif (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,009 dan t_{tabel} sebesar 1,989. Serta P_{value} sebesar $0,000 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai P_{value} lebih kecil dari nilai α 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan Teknologi Informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Dengan demikian H_{02} ditolak dan **H_{a2} diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Quenseca Epiane (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,898 dan t_{tabel} sebesar 1,989. Serta P_{value} sebesar $0,000 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai P_{value} lebih kecil dari nilai α 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Dengan demikian H_0 ditolak dan **H_a diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Andi Faradillah (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh

terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.
4. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,726. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (X_1), Teknologi Informasi (X_2) dan Budaya Organisasi (X_3) dapat menjelaskan variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Y) sebesar 72,6%. Sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran terkait penelitian Implementasi SAP berbasis Akrual di Pemerintah Daerah:

1. Penelitian selanjutnya agar menambahkan data responden lebih dari 88 dan diperluas ke kabupaten atau kota lainnya ataupun provinsi sehingga memungkinkan hasilnya akan lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data jika memungkinkan, sehingga dapat menghindari kemungkinan

responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

3. Variabel yang diukur bisa diperluas lagi dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Implikasi

1. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan organisasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memperbaiki kualitas pegawai yang ditugaskan agar dapat menerapkan SAP berbasis akrual dengan baik sehingga menghasilkan LKPD yang akuntabel sesuai standar.
2. Teknologi informasi adalah merupakan ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan informasi yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pemerintah daerah memperbaharui dan memaksimalkan perangkat komputer dan software untuk membantu pegawai dalam

menyajikan LKPD yang berkualitas sesuai dengan SAP berbasis akrual.

3. Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan kinerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pemerintah daerah lebih peduli dengan perubahan yang ada dan dapat bekerja bersungguh-sungguh sehingga penerapan SAP berbasis akrual berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bahtiar, Muchlis, Iskandar. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Hariyanto, Agus. 2012. *Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Semarang: STIE Dharma Putra.
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan*

- Berbasis Akruaal pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar pentahapan Implementasi SAP Akruaal Pemerintah Daerah. Jakarta 25 Maret.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat Penerapan Akuntansi Akruaal n pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas Menuju Akruaal.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruaal.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruaal pada Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau berbasis Akruaal.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian, cetakan ke tujuh*. Bandung: Alfabeta.

